

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu elemen kunci dari perencanaan organisasi adalah anggaran. Anggaran adalah alat manajemen yang sangat penting dalam menjalankan fungsi perencanaan, koordinasi, komunikasi dan kontrol. Anggaran berperan penting sebagai sarana manajemen untuk mengendalikan operasi perusahaan agar strategi yang telah ditetapkan bisa digunakan untuk mencapai tujuan. Disamping itu, Anggaran juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan manajemen. Manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi dengan lebih efektif efisien. Anggaran sebagai alat perencanaan mempunyai peranan dalam hal merencanakan pembiayaan dan pendapatan pada suatu pusat pertanggungjawaban yang akan dicapai oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu dengan melakukan berbagai aktivitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran, di sisi lain, bertindak sebagai alat pengendalian, anggaran berperan dalam menilai kinerja manajer dengan memperhatikan sejauh mana manajer dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dalam anggaran mereka (Fitriyana 2020).

Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di pemerintahan desa tidak hanya mewujudkan kepentingan individu atau kelompok, tetapi benar-benar menyelaraskan tujuannya dengan kesejahteraan rakyat. Kedudukan pemerintah desa sebagai salah satu instansi pemerintah Indonesia yang berperan penting dalam meningkatkan kepentingan masyarakat diwujudkan melalui program pembangunan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6, Pasal 78 Ayat 1 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas desa dan kehidupan masyarakat, serta pengembangan sarana dan prasarana desa, potensi wilayah dan kekayaan alam. Pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan desa dan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang berisi seluruh pendapatan desa dan belanja desa (Fitriyana 2020).

Dikutip dalam Fordhly (2020) menyebut bahwa proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak baik dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah. Akibat dari anggaran ini timbulnya perilaku oportunistik baik bersifat positif maupun bersifat negatif. Perilaku oportunistik yang positif dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja sehingga pimpinan termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya. Sedangkan perilaku oportunistik yang bersifat negatif menyebabkan pimpinan cenderung menciptakan kesenjangan anggaran. Dalam organisasi sektor publik, anggaran merupakan suatu proses politik. Jika pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah terbatas yang berwenang menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, serta hak yang diakui dan dihormati dalam penyelenggaraan pemerintahan. sistem, termasuk mereka yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa, kepala desa harus mengelola keuangan dan kekayaan desa secara bertanggung jawab, transparan, profesional, efisien, bersih, tanpa penggelapan, kolusi, sewenang-wenang. Masalah yang dapat timbul dalam proses penganggaran adalah munculnya budget slack atau kesenjangan anggaran, yaitu perilaku disfungsi yang sengaja dilakukan dan berpotensi merugikan organisasi atau individu personel dalam organisasi.

Apabila terjadinya kesenjangan anggaran, bawahan cenderung mengusulkan anggaran yang mengurangi pendapatan dan meningkatkan biaya sehingga membantu mereka mencapai tujuan mereka dibandingkan dengan entitas terbaik yang diusulkan (Agustina, M.F 2020). Masalah umum yang dihadapi pemerintah desa adalah bawahan dan kepala perangkat desa menyimpang dari penggunaannya saat menetapkan anggaran. Artinya, dimana anggaran yang dibuat atau ditetapkan

melebihi pengeluaran atau bukan prioritas utama artinya anggaran yang dibuat atau ditetapkan lebih besar dari pada pengeluaran atau mengusulkan suatu kegiatan yang tidak menjadi prioritas utama, perilaku mengusulkan kegiatan ini yang mempunyai peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi yang besar, mengalokasikan komponen belanja yang tidak penting dalam suatu kegiatan, mengusulkan jumlah belanja yang terlalu besar untuk komponen belanja dan anggaran setiap kegiatan, dan memperbesar anggaran untuk kegiatan yang sulit diukur hasilnya (Agustina, M.F 2020).

Manurut Gusti (2019) faktor yang dapat mempengaruhi kesenjangan anggaran adalah perilaku oportunistik, dimana perilaku oportunistik merupakan perilaku yang mengarah pada motivasi sekelompok orang menghadapi situasi-situasi di mana dalam posisi tertentu, mereka merasa mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya. Perilaku oportunistik ini adalah perilaku yang berusaha mencapai ambisi dengan cara apapun, termasuk melalui cara yang ilegal atau dilarang. Faktor yang mempengaruhi perilaku oportunistik adalah kekuatan dan keterampilan seseorang.

Disini, perilaku oportunistik (*Opportunistic Behaviour*) berarti memanfaatkan peluang yang muncul dalam kaitannya dengan jabatan kepala daerah atau kepala desa. APBD atau APBDes harus digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Namun yang terjadi adalah masih banyaknya kepala daerah ataupun kepala desa menetapkan program dan jumlah anggaran tidak berdasarkan kepentingan rakyat tetapi berdasarkan kepentingan kepala daerah ataupun kepala desa tersebut (Suartini et.al, 2016). Hal ini berkaitan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran akan memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan utilitasnya melalui alokasi sumber daya dalam anggaran yang ditetapkan. Dalam hal ini bawahan akan menyembunyikan informasi yang dimiliki untuk kepentingan pribadinya.

Selain itu faktor yang dapat mempengaruhi kesenjangan anggaran yaitu *Locus Of Control*, dimana *Locus Of Control* ini *locus of control* merupakan tingkatan dimana individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka

sendiri. Jika dikaitkan dengan partisipasi anggaran, seseorang yang tidak memiliki internal *locus of control* yang baik akan gagal menjalankan fungsi dan perannya dalam proses penyusunan anggaran serta dalam mencapai sasaran anggaran (Fitriyana 2020).

Dan menurut Ujianti (2019) Faktor lain yang mempengaruhi adanya kesenjangan anggaran yaitu asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan perbedaan informasi yang dimiliki manajer tingkat atas dengan manajer tingkat bawah karena adanya perbedaan sumber dan akses atas informasi tersebut. Partisipasi dari bawahan dalam menyusun anggaran dapat memberikan kesempatan untuk memasukkan informasi lokal. Bawahan dapat mengkomunikasikan/mengungkapkan beberapa informasi pribadinya yang mungkin dapat dimasukkan dalam anggaran. Disamping itu, bawahan juga dapat menyembunyikan beberapa informasi pribadi sehingga dapat mempengaruhi kesenjangan anggaran semakin tinggi asimetri informasi, maka akan semakin tinggi terjadinya kesenjangan anggaran. Hal tersebut berkaitan dengan teori agensi yang berdasarkan pada asumsi tentang informasi dimana dijelaskan bahwa akan terjadi asimetri informasi dimana pihak prinsipal akan memperoleh informasi yang kurang atau tidak lengkap dalam informasi yang diberikan oleh pihak agen.

Dapat dilihat bahwa banyaknya kasus-kasus penyelewengan yang terjadi di desa-desa pada kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci, salah satunya yaitu adanya kasus korupsi terkait dengan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). Dikutip dari Jambikita.id memberitakan terkait dengan adanya kasus korupsi oleh kepala desa di Desa Balai Semurup Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang mengakibatkan terdapat kerugian negara sekitar Rp 300 juta. Dimana dengan adanya kasus tersebut kepala desa di desa balai semurup kecamatan air hangat dituntut hukuman 6,6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, subsidi 6 bulan penjara. Selain itu dikutip dari metrojambi.com ratusan warga desa Koto Diair menggelar aksi demo dikantor camat air hangat untuk menuntut kades mundur dari jabatannya. Kesenjangan anggaran juga terjadi di desa Koto Diair Kecamatan air hangat kabupaten kerinci, adanya indikasi terjadinya kesenjangan anggaran

pendapatan dan belanja desa juga diperkuat dengan data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai berikut :

Tabel 1.1
Laporan Keseluruhan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun 2020
(dalam satuan rupiah)

Keterangan	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	1.120.384.511,71	1.560.758.000,00
Belanja	1.122.144.511,71	379.240.000,00

Sumber : Pemerintah Desa Koto Diair

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah Desa Koto Diair dimana anggaran belanja desa dianggarkan lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi terbaik yang sebenarnya, dapat dilihat dari realisasinya belanja desa terealisasi hanya 379.240.000,00 dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar 1.122.144.511,71 atau hanya terealisasi sebesar 33,80% saja dari anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Disini dapat dilihat bahwa realisasi belanja desa jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa Koto Diair. Dari data realisasi belanja desa yang hanya sebesar 33,80% dari anggaran belanja desa dilihat bahwa adanya kecenderungan pemerintah desa mengalokasikan belanja-belanja desa yang seharusnya tidak diperlukan, tindakan pemerintah desa yang cenderung menaikkan atau menambah belanja desa dan menurunkan pendapatan dilakukan agar anggaran tersebut mudah untuk dicapai sehingga hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan anggaran.

Selain itu, tindakan pemerintah desa yang mengurangi anggaran pendapatan atau dengan kata lain menetapkan target pendapatan dibawah realisasi pendapatan, dimana dari tabel diatas dilihat bahwa realisasi pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar 1.120.384.511,71 dengan realisasi sebesar 1.560.758.000,00 hal tersebut dilakukan agar target anggaran mudah dicapai yang terlihat pada pencapaian realisasi pendapatan yang cenderung lebih besar dari target anggaran yang telah

ditetapkan sehingga kinerja pemerintah desa tersebut dinilai baik. Kesenjangan anggaran yang terjadi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja menyembunyikan informasi yang hanya dapat menguntungkan diri sendiri (Hasanah dan Suartana 2015).

Dalam Penelitian ini peneliti mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Ujianti, R. (2019). Dengan judul penelitiannya Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Budgetary Slack Pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ujianti, R (2019) yaitu **Pertama**, dimana dalam penelitian ini peneliti menambah variabel independen yaitu *opportunistic behaviour*, dimana variabel independen *Opportunistic Behaviour* diambil pada penelitian yang dilakukan oleh Gusti, J. S. S., & Syofyan, E. (2019), Zulfikar (2015) dan penelitian yang dilakukan oleh Sari, K. M. (2019), dan variabel independen *Locus Of Control* diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2020), Fitriyana (2020), serta variabel independen Asimetri Informasi yang diambil pada penelitian yang dilakukan oleh Ujianti (2019), Fitriyana (2020), Afdhal (2021) dan Zulfikar (2015).

Kedua, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ujianti, R (2019) yaitu terletak pada objek yang dijadikan sampel penelitian, pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu pada pemerintah desa di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ujianti, R (2019) memilih pemerintah daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Ketiga, Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteri-kriteria tertentu.

Masih terdapat ketidakkonsistenan mengenai pengaruh perilaku oportunistik (*Opportunistic Behaviour*) terhadap senjangan anggaran. Hasil Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulfikar 2015 didapat hasil bahwa *Opportunistic Behaviour* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Dimana pengaruh positif menunjukkan bahwa *Opportunistic Behaviour*

searah dengan kesenjangan anggaran dengan kata lain semakin tingginya perilaku opportunistik maka akan mempengaruhi tingginya tingkat kesenjangan anggaran yang terjadi. Dan begitu juga sebaliknya jika tingkat perilaku opportunistik rendah maka tingkat kesenjangan anggaran yang kemungkinan terjadi juga akan rendah. Dimana tingkat perilaku oportunistik ini memiliki peranan penting terhadap kesenjangan anggaran. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yuen et.al (2015) dimana menunjukkan bahwa *Opportunistic Behaviour* berpengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gusti 2019 pada hasil penelitiannya didapat kesimpulan bahwa *Opportunistic Behaviour* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Dimana dalam penelitiannya menyebut bahwa apabila terjadi kenaikan *Opportunistic Behaviour* maka tidak akan mempengaruhi tingkat kesenjangan anggaran. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari, K.M (2019) didapat hasil bahwa *opportunistic behaviour* juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2020) didapat hasil bahwa *Locus Of Control* berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran, dimana jika seseorang yang memiliki *locus of control* yang tinggi dalam dirinya maka kecenderungan melakukan *budgetary slack* pun akan semakin rendah. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani. W (2018) yang juga didapat hasil bahwa *Locus Of Control* berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyana (2020) didapat hasil penelitian bahwa *Locus Of Control* tidak berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Ujianti. R (2019) didapat hasil penelitian bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran, penelitian ini sejalan dengan enelitian yang dilakukan oleh Fitriyana (2020), Zulfikar (2015) dan Toisuta. A (2019) yang juga didapat hasil penelitian bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Afdhal (2021) dimana hasil penelitiannya didapat hasil penelitian

bahwa asimetri informasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesenjangan anggaran.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti uraikan diatas dimana penelitian-penelitian sebelumnya didapat hasil atau menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda sehingga dengan hasil yang berbeda tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH OPPORTUNISTIC BEHAVIOUR, LOCUS OF CONTROL DAN ASIMETRI INFORMASI TEHADAP KESENJANGAN ANGGARAN (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka didapat rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah *Opportunistic Behaviour* berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran pada pemerintah desa di kecamatan air hangat Kabupaten Kerinci ?
2. Apakah *Locus Of Control* berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran pada pemerintah desa di kecamatan air hangat kabupaten kerinci ?
3. Apakah Asimetri Informasi berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran pada pemerintah desa di kecamatan air hangat kabupaten kerinci ?
4. Apakah *Opportunistic Behaviour, Locus Of Control* dan Asimetri Informasi secara bersamaan berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran pada pemerintah desa di kecamatan air hangat kabupaten kerinci ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji pengaruh *Opportunistic Behaviour* terhadap kesenjangan anggaran pada pemerintah desa di kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

2. Untuk menguji pengaruh *Locus Of Control* terhadap kesenjangan anggaran pada pemerintah desa di kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.
3. Untuk menguji pengaruh Asimetri Informasi terhadap kesenjangan anggaran pada pemerintah desa di kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu sebagai sarana untuk penelitian ilmiah yang akan memperdalam bidang keilmuan penulis terutama dalam bidang akuntansi sektor publik.

2. Bagi Masyarakat

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini bagi masyarakat yaitu dapat dijadikan sebagai sarana pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah maupun bagi pemerintah desa melalui informasi mengenai penyebab kesenjangan anggaran yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

3. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menciptakan anggaran yang efektif dan mencegah terjadinya senjangan anggaran dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Desa.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan patokan dalam penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan *Oppportunistic Behaviour*, *Locus Of Control*, Asimetri Informasi dan kesenjangan anggaran dalam lingkup pemerintah desa maupun pemerintah daerah dan lingkup-lingkup yang berkaitan dengan anggaran.